

# MANAJEMEN ASET DALAM AKUNTABILITAS KINERJA SEBAGAI WUJUD TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

**Taufik Irawan, S.E., M.M.**  
Deputi Bidang Investigasi BPKP  
email: [taufik.irawan@bpkp.go.id](mailto:taufik.irawan@bpkp.go.id)

## Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan manajemen aset yang diduga menjadi penyebab rendahnya akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten KR. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen aset yang terdiri dari inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, dan pengawasan dan pengendalian aset terhadap akuntabilitas kinerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) menggunakan Aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen manajemen aset masing-masing berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini berarti bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang ditunjukkan dengan predikat sangat memuaskan pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Pemerintah Kabupaten KR dituntut untuk melaksanakan manajemen aset dengan optimal dan sebaik-baiknya.

**Kata Kunci** : manajemen aset, akuntabilitas kinerja, kuantitatif, tata kelola pemerintahan yang baik.

## Abstract

*This research is conducted based on the asset management problem which is suspected to be the cause of the low quality of performance accountability at the Local Government of KR. The objectives of the research are to know the effect of asset management which consists of asset inventory, asset legal audit, asset valuation, and asset monitoring and control on the quality of performance accountability. The research method used is descriptive verification method with quantitative approach. Data processing is done by Structural Equation Model (SEM) approach using SmartPLS. The results showed that asset management have a positive effect on the quality of performance accountability. This means that to improve performance accountability as a form of good governance, which is shown with a very satisfactory predicate on the evaluation result of SAKIP, the Local Government of KR is required to implement optimal and best asset management.*

**Keywords:** *asset management, performance accountability, quantitative, good governance.*

## 1. PENDAHULUAN

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam manajemen

organisasi publik dilaksanakan melalui sistem akuntabilitas kinerja. Menurut Mahsun (2006), akuntabilitas publik berarti pemberian informasi

dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Kinerja organisasi diperoleh dengan efisiensi dan efektivitas proses organisasi, yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik (Bastian, 2010). Sementara ruang lingkup akuntabilitas menurut Halim (2007) meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, terhadap aktivitas finansial dan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Penilaian akuntabilitas kinerja dilakukan untuk menentukan keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten KR Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil evaluasi Nomor LEV-408/PW14/3/2018 tanggal 18 Desember 2018, memperoleh nilai sebesar 54,54 dengan kategori CC (Cukup). Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten KR masih banyak memerlukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil.

Tabel 1 Komponen Penilaian SAKIP Kabupaten KR Tahun Anggaran 2017

<b>Komponen</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai</b>
Perencanaan Kinerja	30	18,06
Pengukuran Kinerja	25	10,98
Pelaporan Kinerja	15	9,18
Evaluasi Internal	10	5,72
Capaian Kinerja	20	10,60
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>54,54</b>

Sumber : LEV-408/PW14/3/2018 Tanggal 18 Desember 2018

Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi SAKIP di Kabupaten KR dilakukan dengan uji petik pada 5 (lima) OPD yaitu Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pemenuhan terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan hanya untuk memenuhi asas formalitas dokumennya telah terpenuhi. Dokumen perencanaan yang dibuat tidak dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan, tidak direvisi dan dilaporkan secara berkala. Dokumen pelaksanaannya dibuat sebatas melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan, belum sepenuhnya diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Capaian kinerja yang dilaporkan belum dapat diyakini validitasnya. Hasil evaluasi juga menunjukkan adanya ketidakselarasan dalam pelaporan kinerja. Dari 5 (lima) OPD yang dilakukan uji petik, hanya Inspektorat yang melaporkan kinerjanya selaras.

Dalam pelaksanaan manajemen aset pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten KR juga memiliki permasalahan sebagaimana dijabarkan dalam Laporan Hasil Audit BPK-RI tanggal 28 Mei 2018 yaitu : terdapat sejumlah bidang tanah yang belum bersertifikat; belum dilakukannya pengamanan aset tanah secara optimal; belum dilakukannya penilaian dan pencatatan atas aset tanah jalan; belum memadainya penatausahaan aset (termasuk aset ekstrakomptabel dan masih banyaknya kendaraan yang belum dilengkapi buku pemilik kendaraan); belum tercatatnya gedung sekolah sumbangan komite atau orang tua murid; dan masih dicatatnya aset lainnya secara global (tidak terinci). Selain itu, terdapat juga permasalahan pada tahun 2016 yang belum sepenuhnya selesai ditindaklanjuti, yaitu terkait

pencatatan aset yang akan dihibahkan kepada pemerintah desa.

Menurut Siregar (2004), kegiatan manajemen aset berupa barang milik daerah terdiri dari lima tahapan yaitu inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengawasan dan pengendalian aset. Berdasarkan fenomena yang ditemukan pada Pemerintah Kabupaten KR, maka penulis akan meneliti empat tahapan dalam kegiatan pengelolaan barang milik daerah yaitu inventarisasi, legal audit, penilaian, dan pengawasan dan pengendalian aset.

Hasil penelitian Harrison et al (2012) dan Ofoegbu (2014) tentang akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa pengukuran kinerja sebagai bagian dari persyaratan akuntabilitas umum membutuhkan pertimbangan strategi dan pemangku kepentingan. Adopsi dan implementasi IPSAS akrual akuntansi di Nigeria secara signifikan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan sektor publik Nigeria. Kualitas informasi keuangan meningkat secara signifikan dengan pengenalan dan implementasi IPSAS dalam pelaporan keuangan sektor publik Nigeria. Penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu manajemen aset tidak hanya dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan namun juga dikaitkan dengan akuntabilitas kinerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan manajemen aset yang terdiri dari inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset dan pengawasan dan pengendalian aset terhadap akuntabilitas kinerja sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten KR.

## **Manajemen Aset**

Menurut Lemer (2000) dalam Siregar (2004), manajemen aset merupakan proses menjaga atau memelihara dan memanfaatkan modal publik. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sehingga tercipta manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Tujuan dari manajemen aset menurut AAMCoG (2012) adalah untuk mengoptimalkan potensi pelayanan aset dan untuk meminimalkan risiko terkait dan biaya serta memastikan peningkatan secara positif dari modal alam dan sosial selama siklus hidup aset.

Adapun menurut Siregar (2004) manajemen aset merupakan kumpulan disiplin, metode, prosedur dan perangkat untuk mengoptimalkan dampak bisnis keseluruhan atas biaya-biaya, kinerja dan resiko yang timbul terkait dengan ketersediaan, efisiensi, umur pakai dan regulasi keselamatan atau kepatuhan pada aturan lingkungan hidup dari aset fisik perusahaan.

Manajemen aset itu sendiri menurut Siregar (2004) dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan perkembangan Sistem Informasi Manajemen Aset. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik, dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain.
- b. Legal audit aset merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem

dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal, strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.

- c. Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen.
- d. Optimalisasi aset merupakan satu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi.
- e. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada Pemerintah Daerah saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). (Siregar, 2004)

### **Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance*. Setiap Instansi Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas kinerja juga merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* (1970) dalam Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap sumber daya finansial, kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif, efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan, dan hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Probity and legality accountability*), Akuntabilitas Proses (*Process accountability*), Akuntabilitas Pelaksanaan (*Performance accountability*), Akuntabilitas Program (*Program accountability*), dan Akuntabilitas Kebijakan (*Policy accountability*).

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Arikunto (2010) menyatakan bahwa penelitian dekriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang ciri-ciri variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di

lapangan. Menurut Kasiram (2008), metode kuantitatif merupakan suatu proses dalam upaya menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

a. Variabel *Independent*

- 1) Inventarisasi aset ( $X_1$ )
- 2) Legal audit aset ( $X_2$ )
- 3) Penilaian aset ( $X_3$ )
- 4) Pengawasan dan pengendalian aset ( $X_4$ )

b. Variabel *Dependent* :

Akuntabilitas kinerja (Y)

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari jawaban responden yang diteliti, yaitu berupa data mengenai pendapat atau fenomena dari obyek.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten KR yang bertindak sebagai pengurus barang, Kasubbag Umum, serta pegawai Bidang Aset BPKAD sehingga total sebanyak 84 orang.

Metode yang digunakan dalam penarikan sampel ini adalah *sampling jenuh* (sensus), yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2010). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 84 pegawai pada Pemerintah Kabupaten KR.

Pemberian skor ini menggunakan sistem skala lima, yaitu jawaban a (Sangat setuju) diberi skor 5 sampai dengan Jawaban e (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara acak dengan menggunakan metode:

- a. Wawancara tidak terstruktur
- b. Kuesioner
- c. Dokumentasi
- d. Observasi

## Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas menurut Sugiyono (2010) merupakan cara untuk menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x \sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}} \quad (1)$$

Semua data yang valid memiliki angka r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel dan dapat dimasukkan ke dalam pengolahan data, sedangkan data yang tidak valid akan dikeluarkan. Selain itu, nilai korelasi dibandingkan dengan 0,3. dimana jika nilai korelasi ( $r$ ) lebih besar dari 0,3 maka, instrumen tersebut dinyatakan valid.

Pengertian reliabilitas menurut Sugiyono (2010) yaitu derajat konsistensi/keajegan data dalam interval waktu tertentu. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan *internal consistency* dengan teknik *split-half* dan dianalisis dengan menggunakan rumus *Spearman Brown* yaitu:

$$r_i = \frac{d.r_b}{1+r_b} \quad (2)$$

Nasution dan Usman (2006) menyatakan jika koefisien reabilitas mendekati 1 sangat baik, jika berada diatas 0,7 baik, bila nilai *Alpha* berada di bawah 0,6, maka dapat dikatakan bahwa pengukuran yang dilakukan tidak *reliable*.

## Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) menggunakan aplikasi *software Partial Least Square* (SmartPLS). PLS merupakan persamaan struktural yang berbasis komponen atau varian dan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis *covariance* menjadi berbasis varian.

### Model Pengukuran (*Outer Model*)

terdapat 3 (tiga) kriteria yang digunakan untuk menilai *outer model* yaitu *Convengent Validity*, *Diseriminant Validity*, dan *Composite Reliability*. *Convengent validity* dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* yang dihitung dengan PLS. Menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2006), untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran, memperoleh nilai *loading* 0,5 sampai 0,6 telah dapat dianggap cukup memadai.

### Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikasi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* terhadap variabel bebasnya, uji *Stone-Geisser Q-square* untuk *predictive relevance* dan uji *t* serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural (Ghozali, 2006).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian validitas disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2 *Average Variance Extracted (AVE)*

	AVE	$\sqrt{AVE}$	Ket
Inventarisasi Aset	0.597	0.773	Valid
Legal Audit Aset	0.509	0.713	Valid
Penilaian Aset	0.611	0.782	Valid
Pengawasan dan Pengendalian Aset	0.662	0.814	Valid
Akuntabilitas Kinerja	0.523	0.723	Valid

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki nilai AVE diatas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai validitas yang baik atau valid dari

setiap indikatornya atau kuesioner yang digunakan untuk mengetahui pengaruh inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian aset, pengawasan dan pengendalian aset terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja.

Pengujian reliabilitas data dalam penelitian ini menggunakan *software SmartPLS* dengan kriteria uji *Composite reliability* yang akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3 *Composite Reliability (CR)*

	CR	Ket
Inventarisasi Aset	0.880	Reliabel
Legal Audit Aset	0.838	Reliabel
Penilaian Aset	0.886	Reliabel
Pengawasan dan Pengendalian Aset	0.886	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja	0.916	Reliabel

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019

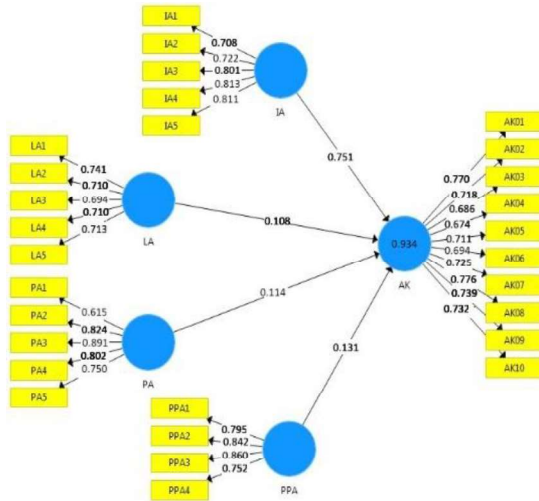
Dari Tabel 3, dapat dilihat setiap variabel tersebut memiliki nilai *composite reliability* diatas 0.7 yang menandakan bahwa *internal consistency* dari variabel independen inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, pengawasan dan pengendalian aset, dan variabel dependen kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja memiliki reliabilitas yang baik. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban seseorang terhadap pernyataan dari kuesioner atas variabel inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian aset, pengawasan dan pengendalian aset, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja menghasilkan jawaban yang konsisten dari waktu ke waktu.

### Analisis Data Pengaruh Manajemen Aset terhadap Akuntabilitas Kinerja

#### Uji *Outer Model (Measurement Model)*

Hubungan antara manajemen aset yang terdiri dari inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, pengawasan dan pengendalian

aset terhadap akuntabilitas kinerja disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 1

Full Model Structural Partial Least Square

Uji Outer Model Variabel Inventarisasi Aset

Tabel 4 Nilai Outer Loadings Variabel Inventarisasi Aset (IA)

	OSE	Mean	SD	T-Stat
<b>Indikator IA</b>				
IA1	0.708	0.702	0.075	9.454
IA2	0.722	0.715	0.076	9.505
IA3	0.801	0.799	0.049	16.335
IA4	0.813	0.816	0.033	24.932
IA5	0.811	0.808	0.043	18.641

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019

Berdasarkan Tabel 4, nilai *outer loadings* dari indikator variabel inventarisasi aset tidak terdapat nilai yang kurang dari 0,5 dan menunjukkan korelasi dengan variabel secara keseluruhan telah memenuhi *Convergent validity*. Nilai T-Statistik dari tiap indikator lebih besar daripada T-Tabel (1.9893). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel inventarisasi aset telah memenuhi syarat dari kecukupan model atau *Discriminant validity*.

Uji Outer Model Variabel Legal Audit Aset

Tabel 5 Nilai Outer Loadings Variabel Legal Audit Aset (LA)

	OSE	Mean	SD	T-Stat
<b>Indikator LA</b>				
LA1	0.741	0.739	0.068	10.855
LA2	0.710	0.704	0.070	10.112
LA3	0.694	0.698	0.067	10.338
LA4	0.710	0.702	0.087	8.194
LA5	0.713	0.709	0.082	8.717

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019

Berdasarkan Tabel 5, nilai *outer loadings* dari indikator variabel legal audit aset tidak terdapat nilai yang kurang dari 0,5 dan menunjukkan korelasi dengan variabel secara keseluruhan telah memenuhi *Convergent validity*. Nilai T-Statistik dari tiap indikator lebih besar daripada T-Tabel (1.9893). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel legal audit aset telah memenuhi syarat dari kecukupan model atau *Discriminant validity*.

Uji Outer Model Variabel Penilaian Aset

Tabel 6 Nilai Outer Loadings Variabel Variabel Penilaian Aset (PA)

	OSE	Mean	SD	T-Stat
<b>Indikator PA</b>				
PA1	0.615	0.606	0.112	5.495
PA2	0.824	0.819	0.052	15.721
PA3	0.891	0.892	0.022	40.325
PA4	0.802	0.799	0.052	15.351
PA5	0.750	0.748	0.069	10.809

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019

Berdasarkan Tabel 6, nilai *outer loadings* dari indikator variabel penilaian aset tidak terdapat nilai yang kurang dari 0,5 dan menunjukkan korelasi dengan variabel secara keseluruhan telah memenuhi *Convergent validity*. Nilai T-Statistik dari tiap indikator lebih besar daripada T-Tabel (1.9893). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel penilaian aset

telah memenuhi syarat dari kecukupan model atau *Discriminant validity*.

### Uji *Outer Model* Variabel Pengawasan dan Pengendalian Aset

Tabel 7 Nilai *Outer Loadings* Variabel Pengawasan dan Pengendalian Aset

	<i>OSE</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>T-Stat</i>
<b>Indikator PPA</b>				
<b>PPA1</b>	0.795	0.791	0.062	12.747
<b>PPA2</b>	0.842	0.837	0.052	16.187
<b>PPA3</b>	0.860	0.862	0.032	26.652
<b>PPA4</b>	0.752	0.740	0.063	11.899

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019

Berdasarkan Tabel 7, nilai *outer loadings* dari indikator variabel pengawasan dan pengendalian aset tidak terdapat nilai yang kurang dari 0,5 dan menunjukkan korelasi dengan variabel secara keseluruhan telah memenuhi *Convergent validity*. Nilai T-Statistik dari tiap indikator lebih besar daripada T-Tabel (1.9893). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pengawasan dan pengendalian aset telah memenuhi syarat dari kecukupan model atau *Discriminant validity*.

### Uji *Outer Model* Variabel Akuntabilitas Kinerja

Tabel 8 Nilai *Outer Loadings* Variabel Akuntabilitas Kinerja (AK)

	<i>OSE</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>T-Stat</i>
<b>Indikator AK</b>				
<b>AK01</b>	0.770	0.769	0.053	14.549
<b>AK02</b>	0.718	0.716	0.061	11.843
<b>AK03</b>	0.686	0.683	0.081	8.525
<b>AK04</b>	0.674	0.670	0.077	8.798
<b>AK05</b>	0.711	0.706	0.074	9.589
<b>AK06</b>	0.694	0.688	0.075	9.225
<b>AK07</b>	0.725	0.723	0.061	11.807
<b>AK08</b>	0.776	0.778	0.042	18.461

	<i>OSE</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>T-Stat</i>
<b>AK09</b>	0.739	0.736	0.056	13.190
<b>AK10</b>	0.732	0.729	0.065	11.186

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019

Berdasarkan Tabel 8, nilai *outer loadings* dari indikator variabel akuntabilitas kinerja tidak terdapat nilai yang kurang dari 0,5 dan menunjukkan korelasi dengan variabel secara keseluruhan telah memenuhi *Convergent validity*. Nilai T-Statistik dari tiap indikator lebih besar daripada T-Tabel (1.9893). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel akuntabilitas kinerja telah memenuhi syarat dari kecukupan model atau *Discriminant validity*.

### Pengujian *Inner Model*

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen (Ghozali, 2006).

Adapun *inner model (Result For Inner Weight)* dalam penelitian ini terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 9 *Result For Inner Weight*

	<i>OSE</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>T-Stat</i>
<b>IA-&gt;AK</b>	0.751	0.741	0.047	16.038
<b>LA-&gt;AK</b>	0.108	0.107	0.034	3.194
<b>PA-&gt;AK</b>	0.114	0.115	0.046	2.495
<b>PPA-&gt;AK</b>	0.131	0.136	0.036	3.633

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019

Berdasarkan Tabel 9, *original sample estimate* dan T-Statistik pada inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian aset semuanya lebih besar dari T-Tabel yaitu 1.9893.

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-Square* untuk variabel laten dependen yang ditunjukkan pada table berikut:



Tabel 10 *R-Square*

	<b>R-square</b>
Akuntabilitas Kinerja (AK)	0.934

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019

Berdasarkan Tabel 10, nilai *R-square* variabel konstruk akuntabilitas kinerja 0.934 (93.4%). Semakin tinggi *R-square*, maka semakin besar variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sehingga semakin baik persamaan strukturalnya.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 9, variabel inventarisasi aset berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja yang ditunjukkan dengan nilai loading faktor terbesar yaitu 0.751 dan nilai t-statistik sebesar 16.038. Hal ini berarti bahwa semakin baik inventarisasi aset dilakukan, baik dari sisi fisik dan yuridisnya, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis meliputi status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labeling*, pengelompokkan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Variabel legal audit aset berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja yang ditunjukkan dengan nilai loading faktor terbesar yaitu 0.108 nilai T-Statistik 3.194. Hal ini berarti semakin baik legal audit aset, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Legal audit aset meliputi satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal,

strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Permasalahan legal yang seperti status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain harus segera ditangani.

Variabel penilaian aset berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja yang ditunjukkan dengan nilai loading faktor terbesar yaitu 0.114 dan nilai T-Statistik 2.495. Hal ini berarti semakin baik penilaian aset, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian aset yang dikuasai. Penilaian dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan konsultan penilaian yang independen, misalnya KPKNL. Hasil dari nilai tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui nilai aset maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang akan dijual.

Variabel pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja yang ditunjukkan dengan nilai loading faktor terbesar yaitu 0.131 dan nilai T-Statistik 3.633. Hal ini berarti semakin baik pengawasan dan pengendalian aset, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Pengawasan dan pengendalian aset dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi SIMDA BMD dari BPKP. Pengawasan dan pengendalian merupakan tindakan pengamanan terhadap aset daerah agar terhindar dari ketidakjelasan pengelolaan aset yang mengakibatkan tidak berjalannya manajemen aset dengan baik. Pengamanan aset meliputi kegiatan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum. Pengamanan administrasi, yaitu dengan melengkapi sertifikat

dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan. Pengamanan fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang. Tindakan hukum, yaitu dengan cara melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian data dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen aset yang terdiri dari inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, dan pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten KR. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen aset yang pada Pemerintah Kabupaten KR yang meliputi inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, dan pengawasan dan pengendalian aset jika dilaksanakan dengan semakin baik dan optimal, maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja, yang ditunjukkan dengan meningkatnya hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Kepada Pemerintah Kabupaten KR, agar melaksanakan manajemen aset dengan lebih baik dan optimal. Dengan melaksanakan manajemen aset yang baik, akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditunjukkan dengan kenaikan hasil penilaian akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan manajemen aset dapat dijabarkan sebagai berikut:
  - 1) Melakukan inventarisasi atau sensus aset dalam 5 (lima) tahun sekali dengan

melibatkan seluruh OPD, sehingga data aset baik dalam penggunaan maupun pemanfaatannya dapat lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Lebih serius dalam menyikapi bukti dan status kepemilikan aset khususnya tanah guna menghindari pengambil-alihan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
  - 3) Membentuk tim penilaian aset dan segera melaksanakan tugasnya agar tidak ada lagi aset-aset yang belum ada nilainya.
  - 4) Rutin memantau kondisi aset-aset yang ada dengan melibatkan Inspektorat sehingga penggunaan aset dapat optimal dan tidak terdapat aset yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan (*idle*).
- b. Dalam rangka melaksanakan manajemen aset untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten KR dapat berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti DJKN, BPN, BPKP serta MAPPI agar mempermudah proses pelaksanaannya.
  - c. Bagi akademisi atau peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menemukan dan menguji variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja, memperluas responden terhadap pejabat pengambil keputusan strategis sehingga memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, diharapkan untuk menggunakan objek penelitian pada pemerintah daerah lain sehingga dapat dibandingkan dan diperbaiki kelemahan-kelemahan yang mungkin muncul dalam penelitian ini.

## 5. REFERENSI

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- BPKP. 2018. *Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten KR Tahun Anggaran 2017*. Nomor LEV-408/PW14/3/2018 tanggal 18 Desember 2018. Pontianak.
- BPK-RI. 2018. 18.B/LHP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten KR Tahun Anggaran 2017*. Pontianak.
- Brown, K. A., Keast, R., Wiewiora, A., Laue, M., & Mahmood, M. N. 2012. *ISAM for XPERTS: integrated strategic asset management (advanced copy)*. Cooperative Research Centre for Infrastructure and Engineering Asset Management (CIEAM) and Australian Asset Management Collaborative Group (AAMCoG), Brisbane, Australia.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harrison, J.A., Rouse, P., & De Villiers, C. J. 2012. *Accountability and Performance Measurement: A Stakeholder Perspective*. The Business and Economics Research Journal, 243.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*. Malang: UIN-Malang Pers
- Mahsun, M, et al. 2006, *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2: 1. (1-17).
- Nasution, M.E., & Usman, H. 2006. *Proses Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : LPFE UI.
- Ofoegbu, G. N. 2014. *New Public Management and Accrual Accounting Basis for Transparency and Accountability in the Nigerian Public Sector*. Journal of Business and Management, 16(7), 104-113.
- Siregar, D. D. 2004. *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.